



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI SELASA, 22 SEPTEMBER 2026

RINGKASAN BERITA HARI INI



Jalan Desa Disulap Jadi Pusat Ekonomi Warga



Acara tersebut sangat berdampak positif bagi kesehatan masyarakat. Sekaligus menggerakkan roda perekonomian warga desa."

Mimik Idayana
Wakil Bupati Sidoarjo

menikmati Car Free Day (CFD) perdana yang sekaligus menjadi ajang unjuk produk bagi 360 pelaku UMKM. Tak sekadar menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga, CFD tersebut juga dimanfaatkan sebagai penggerak roda perekonomian warga. Ratusan lapak UMKM berjajar di sepanjang jalan desa sekitar satu kilometer, menawarkan beragam produk kepada masyarakat yang datang. Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menyambut positif pelaksanaan CFD sekaligus bazar UMKM tersebut. Menurutnya, kegiatan itu memberikan manfaat ganda, yakni mendorong masyarakat hidup sehat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan perekonomian. "Acara tersebut sangat berdampak positif bagi kesehatan masyarakat."

● Ke Halaman 10

LINGKUNGAN

TERTANGKAP
BASAH:
Pelaku
pembuangan
sampah di
sekitar Kantor
Kecamatan
Krian terekam
CCTV.



KECAMATAN KRIAN

Buang Sampah di Area Kecamatan, PKL Terancam Tipiring

SIDOARJO – Kebiasaan membuang sampah sembarangan di belakang Kantor Kecamatan Krian mulai diteribkan. Pelaku yang tertangkap kamera CCTV kini tengah ditelusuri untuk diproses sesuai aturan.

Camat Krian Kusdianto mengatakan, pihaknya berupaya mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV. Jika berhasil diketahui, pelaku akan diberikan sanksi agar kejadian serupa tidak terulang. "Sampahnya cukup beragam, mulai dari kemasan makanan dan minuman hingga sisa buah seperti kulit semangka dan kelapa," katanya.

Kusdianto menduga sampah tersebut dibuang oleh pedagang kaki lima (PKL). Karena itu, pihaknya akan menelusuri rekaman CCTV untuk mengetahui siapa saja yang membuang sampah di lokasi tersebut. (ful/hen)

Terbebani Upah Tinggi, 289 Perusahaan Pindah Lokasi

Pemkab Pastikan Tak Pengaruhi Penyerapan Pekerja

SIDOARJO – Tingginya biaya tenaga kerja menjadi salah satu pertimbangan sejumlah perusahaan berskala besar untuk memindahkan kegiatan usahanya dari Kota Delta. Sejak Januari-September 2026, tercatat 289 unit usaha tidak lagi masuk dalam daftar perusahaan aktif. Mereka memilih relokasi ke daerah lain dengan tingkat upah yang lebih rendah.

Mengacu data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP-TSP) Sidoarjo, terdapat 5.995 perusahaan yang aktif tahun 2025. Turun 289 tahun ini. Penurunan karena relokasi. Perusahaan terbebani biaya pekerja yang tinggi.

Sebagian perusahaan memang relokasi. Mereka berpindah ke sejumlah daerah dengan upah lebih rendah seperti Ngawi."

Benny Airlangga Yogaswara
Kepala DPMP-TSP Sidoarjo



PENURUNAN PERUSAHAAN



Kepala DPMP-TSP Sidoarjo Benny Airlangga Yogaswara membenarkan adanya perusahaan yang memilih memindahkan lokasi usahanya. Salah satu daerah yang menjadi tujuan relokasi adalah Ngawi. "Sebagian perusahaan memang relokasi. Mereka berpindah ke sejumlah daerah dengan upah lebih rendah seperti Ngawi," kata Benny.

Meski jumlah perusahaan mengalami penurunan, kondisi tersebut tidak berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Justru, jumlah pekerja yang terserap mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada periode yang sama, tenaga kerja yang terserap naik dari 4.709 orang menjadi 8.485 orang. Benny mengatakan, peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut berasal dari investasi baru maupun masuknya perusahaan baru ke Sidoarjo.

Investasi Mencapai Rp 7,77 Triliun

Dari sisi investasi, aktivitas penanaman modal di Kota Delta masih menunjukkan pergerakan positif. Jika dilihat sejak awal tahun, realisasi investasi hingga akhir Tri-

wulan II mencapai sekitar Rp 7,77 triliun. Pemkab Sidoarjo mengatakan realisasi investasi sepanjang 2026 mencapai Rp 15,7 triliun.

Mayoritas investasi berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yakni sebanyak 4.886 unit usaha. Sementara, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebanyak 820 unit usaha. Investasi tersebut tersebar di sejumlah sektor, mulai perdagangan, industri, properti hingga jasa.

Sementara itu, sektor perdagangan dan reparasi menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 2.180 orang. Berikutnya sektor jasa dengan 1.606 pekerja. Sedangkan industri makanan menyerap 970 pekerja dan industri kimia sebanyak 623 pekerja. (ful/hen)

ASN Sidoarjo Wajib Lindungi Satu Pekerja Rentan Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Sidoarjo, Bhirawa

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Program Satu ASN Sidoarjo Melindungi Satu Pekerja Rentan.



Ainun Amalia

Program ini mewajibkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Sidoarjo untuk mendaftarkan satu orang pekerja rentan di Sidoarjo menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Iuran kepesertaannya dibayarkan oleh ASN yang bersangkutan, sebagai bentuk sedekah perlindungan sosial.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Sidoarjo, Ainun Amalia, mengatakan untuk tahap awal program ini akan diberlakukan kepada PNS pejabat struktural yang jumlahnya sekitar 600 orang.

"Jadi ini adalah sedekah ASN Sidoarjo kepada pekerja rentan Sidoarjo melalui BPJS Ketenagakerjaan," ujar Ainun, belum lama ini. Nantinya program tersebut akan diperluas ke level staf, administrator, fungsional, dan seluruh ASN lainnya.

Terkait teknis pembayaran, Pemkab Sidoarjo masih mematangkan konsepnya. Iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan sebesar Rp16.800 per bulan.

"Apakah nanti langsung potong gaji saat PNS menerima gaji atau penarikan langsung iuran, masih kami matangkan. Implementasinya insyaallah bulan depan," jelas Ainun.

Dengan program ini, Pemkab Sidoarjo berharap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan seperti tukang becak, ojek pangkalan, pedagang kecil, dan pekerja informal lainnya akan bisa semakin meluas. [kus.dre]

Selain Proyek Molor, Material Rumah Pompa Jati Raya Juga Bermasalah

Wabup Mimik Minta Pasir Bercampur Tanah Dianti

SIDOARJO – Proyek pembangunan rumah pompa di Jalan Jati Raya menghadapi dua persoalan sekaligus. Selain progres pekerjaan tertinggal dari target, kualitas material yang digunakan untuk fondasi juga menjadi sorotan. Pasir yang dipakai

banyak bercampur tanah dan tak layak digunakan untuk pembangunan. Hingga kemarin (21/9), progres proyek baru mencapai 40 persen. Padahal, sesuai target, pekerjaan seharusnya sudah berada di angka 65 persen pekan ini. Keterlambatan 25 persen itu membuat pengerjaan harus dipacu agar tidak melewati batas waktu yang ditentukan.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengatakan,

proyek harus dipercepat karena menjelang musim hujan. Rumah pompa diproyeksikan untuk membantu mengatasi persoalan genangan di kawasan Jati Raya dan sekitarnya. Sehingga, pengerjaan harus dinitaskan sebelum musim hujan. Persoalan lain muncul dari material yang digunakan untuk pekerjaan fondasi. Saat meninjau lokasi, ditemukan pasir yang dituang banyak mengandung tanah.

Kondisi tersebut menjadi

perhatian karena fondasi merupakan bagian penting yang menentukan kekuatan bangunan. "Material fondasi harus diganti. Ada campuran tanah dalam pasir," kata Mimik. Menurut dia, bangunan harus kuat. Sebab fungsinya untuk mengatur air saat musim hujan. (ful/ben)

Sidak Wabup Mimik berdiskusi dengan kontraktor terkait perkembangan rumah pompa di Jalan Jati Raya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Harga Avtur Naik, Penetapan Biaya Haji Alot

Biaya Haji 2022-2026

Tahun	BPIH (Total Biaya Haji)	Bipih (Dibayar Jemaah)	Nilai Manfaat (Subsidi BPKH)	Persentase (Bipih Dibagi Nilai Manfaat)
2022	Rp 97.791.000	Rp 39.886.000	Rp 57.905.000	41 persen : 59 persen
2023	Rp 90.050.637	Rp 49.612.700	Rp 40.237.937	55 persen : 45 persen
2024	Rp 93.410.286	Rp 56.046.172	Rp 37.364.114	60 persen : 40 persen
2025	Rp 89.410.000	Rp 55.430.000	Rp 33.980.000	62 persen : 38 persen
2026	Rp 87.409.366	Rp 54.193.807	Rp 33.215.559	62 persen : 38 persen

Keterangan
• Angka yang tertera adalah nilai rata-rata
• Angka riil berbeda setiap embarkasi
Sumber: Kemenhaj dan Kemenag

- Kementerian Haji dan Umrah Sudah Diskusi dengan Dua Maskapai
- Target Pengesahan Akhir September, Porsi Subsidi Ditetapkan Belakangan

JAKARTA – Pembahasan biaya haji 2027 di Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) masih alot, khususnya untuk urusan tiket penerbangan. Komponen tersebut memakan 40 persen dari total biaya penyeleng-

garan ibadah haji (BPIH). Dirjen Pelayanan Haji Kemenhaj Ian Heriyawan mengungkapkan, untuk komponen biaya haji dalam negeri sudah selesai dibahas.

Baca Harga... Hal 4

Jawa Pos

Harga Avtur Naik, Penetapan Biaya Haji Alot

Sambungan dari Hal 1

Begitu pula dengan komponen biaya haji di luar negeri juga sudah final. "Pembahasan biaya penerbangan alot karena masih fluktuatif, terutama terkait dengan harga avtur," jelasnya di Jakarta tadi malam (21/9).
Ian tidak mengatakan biaya penerbangan haji 2027 bakal lebih mahal dibanding haji 2026. Tapi, dia meminta semua pihak mengecek langsung pergerakan harga avtur yang cende-

runng naik dalam beberapa waktu terakhir.
Dia menegaskan, Kemenhaj sudah berkali-kali membahas biaya penerbangan haji dengan pihak maskapai. Untuk sementara, ada dua maskapai yang diajak berunding, yakni Saudia Airlines dan Garuda Indonesia.
Tapi, lanjut Ian, tidak menutup kemungkinan pemerintah menambah maskapai penerbangan haji. "Supaya bisa menghasilkan angka ongkos haji yang lebih terjangkau," katanya.

Permudah Pelunasan

Komponen tiket penerbangan haji pada BPIH 2026 lalu mencapai Rp 32,9 juta per jemaah. Harga tersebut untuk perhitungan dua kali perjalanan.
Pada musim haji lalu, tepatnya pada Maret, harga avtur sekitar Rp 13 ribu per liter. Sedangkan saat ini harga bahan bakar pesawat terbang itu di pasaran sudah mencapai Rp 23 ribu per liter.
Ian menambahkan, Kemenhaj akan berupaya

menghadirkan biaya haji yang terjangkau sehingga bisa memudahkan calon jemaah saat masa pelunasan nanti. Di antara opsi yang berpeluang dibuka adalah membuka kesempatan untuk maskapai lainnya.
Mengenai keamanan penerbangan haji menyusul konflik antara Saudi dan kelompok Houthi, Ian hanya berharap saat musim haji tiba situasinya mereda. Sedangkan untuk peningkatan layanan di masa Armuzna, Ian mengatakan tidak jadi masalah.

Sebab, sudah ada kesepakatan harga dengan pihak Saudi. Meskipun Saudi meningkatkan standar layanan dari kelas D menjadi kelas C.
Ian berharap calon jemaah haji 2027 bersabar menunggu keputusan final. Nantinya, harga resmi haji 2027 ditetapkan bersama DPR, termasuk pembagian porsi subsidi.
Saat ini porsi subsidi masih diusulkan sebesar 60 persen dari total komponen haji. "Insya Allah akhir bulan ini sudah ada penetapan biaya haji," katanya.

Kelola Rp 184 Triliun
Di bagian lain, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyampaikan, saat ini dana haji yang mereka kelola mencapai Rp 184 triliun. Mereka memastikan dana tersebut dikelola dengan prinsip kehati-

hatian serta strategi investasi berprofil konservatif. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, pengelolaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan dana. Aspek lainnya yang menjadi pertimbangan adalah likuiditas, kesinambungan penyelenggaraan ibadah haji, dan hasil pengembangan keuangan haji.
Fadlul menjelaskan, sekitar 70 persen portofolio keuangan haji ditempatkan pada Surat Berharga Syariah Negara atau sukuk negara. "Kemudian lima persen terdiversifikasi ke fund di Islamic Development Bank, misalnya melalui BPKH Limited di Arab Saudi," jelasnya.
Lalu, sisanya 25 persen dijaga sebagai likuiditas melalui penempatan deposito di sekitar 30 bank

syariah di Indonesia. Menurut dia, pendekatan pembagian porsi investasi itu sangat konservatif.
"Kalau bicara aman, dana haji aman. Tapi, apakah optimal? Belum. Memang ada mandat bahwa BPKH tidak terlalu agresif. Harus konservatif," paparnya.
Dia juga menjelaskan perbedaan tugas dan sumber pendanaan antara BPKH dan Kemenhaj. BPKH memiliki mandat sebagai pengelola dan pengembang keuangan haji. Sedangkan Kemenhaj menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan kewenangannya.
"BPKH tidak memiliki kantor cabang di daerah. Kami hanya berkantor di pusat dengan jumlah pegawai sekitar 200 orang," katanya. (wan/ttg)

Jawa Pos



Pemkab Sidoarjo targetkan pembangunan rumah pompa di sisi timur Mal Lippo Sidoarjo.

Ditarget Rampung Desember

Rumah Pompa di Depan Lippo Plasa Sidoarjo

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Pemkab Sidoarjo menargetkan pembangunan rumah pompa di sisi timur kawasan Lippo, Sidoarjo, rampung pada Desember 2026. Pembangunan ini diharap bisa mengatasi banjir yang kerap menggenangi jalan di bawah layang tol di musim hujan.

Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana meninjau langsung pembangunan rumah pompa itu. Dalam kunjungan itu, Mimik mengecek kualitas material sekaligus rencana penanganan banjir di kawasan Lippo dan sekitarnya.

Mimik mengatakan bahwa kawasan Lippo Mal, khususnya wilayah Sidokare, telah beberapa tahun menjadi salah satu

titik yang berulang kali dilanda banjir. Saat hujan deras, debit air di kawasan itu meningkat cukup tinggi. "Ini harus selesai sebelum puncak musim hujan. Targetnya sekitar 2 sampai 3 bulan. Desember harus selesai," kata Mimik saat meninjau lokasi pembangunan rumah pompa.

Menurutnya, selain mengejar waktu penyelesaian, kualitas konstruksi juga harus menjadi perhatian. Ia menemukan material pasir yang digunakan tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan untuk konstruksi pondasi penahan air.

Mimik meminta material itu diganti dengan pasir berkualitas baik. Sebab, bagian bawah fondasi disebut memiliki banyak sumber air sehingga konstruksi harus benar-benar kokoh dan mampu menahan tekanan air. "Harus diganti. Fondasi tidak boleh dikom-

promikan. Harganya memang lebih mahal, tetapi kami tidak mau bangunan ini hanya bagus sekarang, kemudian bermasalah," tegasnya.

Mimik juga menyoroti kapasitas penampungan air yang disiapkan dalam proyek itu. Kolam penampungan memiliki ukuran sekitar 8 meter x 230 meter dengan volume tampung sekitar 1.000 meter kubik.

Menurutnya, kapasitas itu harus dipastikan mampu menampung debit air yang masuk ketika hujan deras. Jangan sampai rumah pompa selesai dibangun, tetapi persoalan banjir tetap terjadi karena daya tampung tidak mencukupi. "Ini harus dihitung betul. Jangan sampai nanti ketika hujan besar, airnya meluap karena penampungannya tidak cukup," ujarnya. (md/rus)

ASN Sidoarjo Wajib Lindungi Satu Pekerja Rentan Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Sidoarjo, Bhirawa

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Program Satu ASN Sidoarjo Melindungi Satu Pekerja Rentan.



Ainun Amalia

Program ini mewajibkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Sidoarjo untuk mendaftarkan satu orang pekerja rentan di Sidoarjo menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Iuran kepesertaannya dibayarkan oleh ASN yang bersangkutan, sebagai bentuk sedekah perlindungan sosial.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Sidoarjo, Ainun Amalia, mengatakan untuk tahap awal program ini akan diberlakukan ke-



pada PNS pejabat struktural yang jumlahnya sekitar 600 orang.

“Jadi ini adalah sedekah ASN Sidoarjo kepada pekerja rentan Sidoarjo melalui BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Ainun, belum lama ini.

Nantinya program tersebut akan diperluas ke level staf, administrator, fungsional, dan seluruh ASN lainnya.

Terkait teknis pembayaran, Pemkab Sidoarjo masih mematangkan konsepnya. Iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan sebesar Rp16.800 per bulan.

“Apakah nanti langsung potong gaji saat PNS menerima gaji atau penarikan langsung iuran, masih kami matangkan. Implementasinya insyaallah bulan depan,” jelas Ainun.

Dengan program ini, Pemkab Sidoarjo berharap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan seperti tukang becak, ojek pangkalan, pedagang kecil, dan pekerja informal lainnya akan bisa semakin meluas. [kus.dre]

Jalan Desa Disulap Jadi Pusat Ekonomi Warga



**Acara tersebut
sangat berdampak
positif bagi kesehatan
masyarakat.
Sekaligus
menggerakkan roda
perekonomian
warga desa."**

Mimik Idayana
Wakil Bupati Sidoarjo

JALAN

Desa
Durung-
bedug,
Kecama-
tan Candi,
Sidoarjo,
mendadak
berubah
menjadi
pusat
keramaian
pada
Minggu
(20/9) pagi.
Ribuan
warga
tumplek
blek

menikmati Car Free Day (CFD)
perdana yang sekaligus menjadi ajang
unjuk produk bagi 360 pelaku UMKM.

Tak sekadar menjadi ruang bagi
masyarakat untuk berolahraga,
CFD tersebut juga dimanfaatkan
sebagai penggerak roda pereko-
nomian warga. Ratusan lapak UMKM
berjajar di sepanjang jalan desa
sekitar satu kilometer, menawar-
kan beragam produk kepada
masyarakat yang datang.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik
Idayana menyambut positif pelaks-
anaan CFD sekaligus bazar UMKM
tersebut. Menurutnya, kegiatan itu
memberikan manfaat ganda, yakni
mendorong masyarakat hidup sehat
sekaligus membuka ruang bagi
pelaku usaha untuk meningkatkan
perekonomian. "Acara tersebut
sangat berdampak positif bagi
kesehatan masyarakat.

● Ke Halaman 10

Jalan Desa Disulap...

Sekaligus menggerakkan roda perekonomian warga desa," kata Mimik.

Dia berharap kegiatan serupa bisa digelar secara rutin setiap Minggu. Pemkab Sidoarjo, lanjut Mimik, juga akan terus mendorong UMKM agar naik kelas, salah satunya melalui dukungan permodalan.

"Kita berharap setiap hari Minggu diadakan acara seperti ini. Ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian Desa

Durungbedug," ujarnya.

Selain mendorong aktivitas ekonomi, Mimik mengajak masyarakat Durungbedug mempercantik lingkungan desa. Salah satu yang disarankan adalah menanam bunga bougenville di rumah maupun sepanjang jalan. Menurutnya, bougenville relatif mudah dirawat, tahan terhadap panas, dan memiliki bunga yang indah. Bahkan, tanaman tersebut dapat dikembangkan dari potongan tangkai.

"Ayo tanam di rumah masing-masing. Setiap jalan ditanami. Kalau

sudah berbunga, akan membuat lingkungan itu cantik," ajaknya.

Sementara itu, Kepala Desa Durungbedug M Iskaq mengatakan CFD dan bazar UMKM tersebut akan dijadikan agenda rutin pemerintah desa. Setiap Minggu, ruas Jalan Desa Durungbedug akan ditutup mulai pukul 06.00 hingga 09.00 untuk memberikan ruang bagi masyarakat berolahraga dan beraktivitas.

Kegiatan ini sudah beberapa bulan kita rencanakan. Alhamdulillah, dengan dukungan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten, kegiatan sukses

terlaksana," kata Iskaq.

Menariknya, bazar tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pelaku UMKM Desa Durungbedug. Pemdes juga membuka kesempatan bagi UMKM dari desa lain untuk ikut berjualan. Dari sekitar 360 UMKM yang berpartisipasi, sekitar 300 di antaranya merupakan pelaku usaha asal Durungbedug. Sisanya berasal dari desa lain.

Pemdes Durungbedug hanya menarik retribusi kebersihan dan keamanan sebesar Rp 5 ribu per lapak. Dengan konsep tersebut,

pemerintah desa berharap CFD tidak hanya menjadi tempat masyarakat berolahraga, tetapi juga menjadi ruang bertemunya pelaku UMKM dengan calon pembeli setiap akhir pekan. (dik/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

✓ Sidoarjo Terus Dibanjiri Peredaran Rokok Ilegal

Sidoarjo, Bhirawa

Wilayah Kabupaten Sidoarjo terus diserbu dengan peredaran rokok-rokok ilegal. Meski sudah rutin dilakukan operasi gabungan, antara Satpol PP, Bea Cukai dan Polisi Militer, di sejumlah tempat masih ditemukan penjual rokok ilegal.

Senin pagi (21/9) kemarin, Tim Gabungan menyita sebanyak 1.307 bungkus atau 26.140 batang rokok ilegal, yang dijual pada 5 titik. Di antaranya, dari Jl Raya Perumahan Kahuripan Nirwana, Jl Raya Kahuripan Nirwana 2 depan Indomart, Jl Raya Sarirogo Kecamatan Sidoarjo, Jl Raya Sedati dan Jl Raya Buncitan, Kecamatan Sedati.

Yang menjadi pertanyaan, rokok

rokok ilegal ini diproduksi darimana? Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Anas Ali Akbar SSTP mengatakan, Kabupat-

en Sidoarjo menjadi target peredaran rokok ilegal ini, diantaranya karena faktor jumlah penduduk di Sidoarjo cukup besar. Total ada 2.5 juta jiwa.



alikusyanto/bhirawa
Petugas Satpol PP Sidoarjo saat melakukan operasi penyitaan rokok ilegal di daerah Sarirogo Kecamatan Sidoarjo.

“Ini salah satu potensi, sebab rokok ilegal ini dijual murah, sekitar 10 ribuan. Informasinya yang beli tidak hanya orang dewasa saja, tetapi juga ada anak dibawah umur, sebab harganya yang murah itu,” kata Anas.

Pedagang yang berjualan rokok ilegal ini, ternyata bukan warga Sidoarjo saja. Seperti hari yang tertangkap Tim Gabungan, selain ada warga Sidoarjo, juga ada warga yang dari Surabaya dan Madura.

Pada operasi hari ini, hasil terbanyak didapat dari wilayah jalan raya Sedati, petugas menyita sebanyak 472 bungkus atau 9.940 batang rokok ilegal. Penjualnya bernama Rahmawati mengaku dari Surabaya. [kus.fen]

HARIAN
Bhirawa
Media Rakyat Bhirawa Sidoarjo

LINGKUNGAN

**TERTANGKAP
BASAHA:**
Pelaku
pembuangan
sampah di
sekitar Kantor
Kecamatan
Krian terekam
CCTV.



KECAMATAN KRIAN

Buang Sampah di Area Kecamatan, PKL Terancam Tipiring

SIDOARJO – Kebiasaan membuang sampah sembarangan di belakang Kantor Kecamatan Krian mulai ditertibkan. Pelaku yang tertangkap kamera CCTV kini tengah ditelusuri untuk diproses sesuai aturan.

Camat Krian Kusdianto mengatakan, pihaknya berupaya mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV. Jika berhasil diketahui, pelaku akan diberikan sanksi agar kejadian serupa tidak terulang. "Sampahnya cukup beragam, mulai dari kemasan makanan dan minuman hingga sisa buah seperti kulit semangka dan kelapa," katanya.

Kusdianto menduga sampah tersebut dibuang oleh pedagang kaki lima (PKL). Karena itu, pihaknya akan menelusuri rekaman CCTV untuk mengetahui siapa saja yang membuang sampah di lokasi tersebut. (ful/hen)

Jawa Pos

Terbebani Upah Tinggi, 289 Perusahaan Pindah Lokasi

Pemkab Pastikan Tak Pengaruhi Penyerapan Pekerja

SIDOARJO – Tingginya biaya tenaga kerja menjadi salah satu pertimbangan sejumlah perusahaan berskala besar untuk memindahkan kegiatan usahanya dari Kota Delta. Sejak Januari-September 2026, tercatat 289 unit usaha tidak lagi masuk dalam daftar perusahaan aktif. Mereka memilih relokasi ke daerah lain dengan tingkat upah yang lebih rendah.

Mengacu data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP-TSP) Sidoarjo, terdapat 5.995 unit usaha berskala besar hingga akhir tahun lalu. Jumlah tersebut kini turun menjadi 5.706 unit usaha.

Sebagian perusahaan memang relokasi. Mereka berpindah ke sejumlah daerah dengan upah lebih rendah seperti Ngawi.”

Benny Airlangga Yogaswara
Kepala DPMP-TSP Sidoarjo



PENURUNAN PERUSAHAAN

5.995 perusahaan yang aktif tahun 2025
Turun 289 tahun ini
Penurunan karena relokasi
Pengusaha terbebani biaya pekerja yang tinggi



Kepala DPMP-TSP Sidoarjo Benny Airlangga Yogaswara membenarkan adanya perusahaan yang memilih memindahkan lokasi usahanya. Salah satu daerah yang menjadi tujuan relokasi adalah Ngawi. “Sebagian perusahaan memang relokasi. Mereka berpindah ke sejumlah daerah dengan upah lebih rendah seperti Ngawi,” kata Benny.

Meski jumlah perusahaan mengalami penurunan, kondisi tersebut tidak berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Justru, jumlah pekerja yang terserap mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada periode yang sama, tenaga kerja yang terserap naik dari 4.709 orang menjadi 8.485 orang.

Benny mengatakan, peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut berasal dari investasi baru maupun masuknya perusahaan baru ke Sidoarjo.

Investasi Mencapai Rp 7,77 Triliun

Dari sisi investasi, aktivitas penanaman modal di Kota Delta masih menunjukkan pergerakan positif. Jika dihitung sejak awal tahun, realisasi investasi hingga akhir Tri-

wulan II mencapai sekitar Rp 7,77 triliun. Pemkab Sidoarjo menargetkan realisasi investasi sepanjang 2026 mencapai Rp 15,7 triliun.

Mayoritas investasi berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yakni sebanyak 4.886 unit usaha. Sementara, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebanyak 820 unit usaha. Investasi tersebut tersebar di sejumlah sektor, mulai perdagangan; industri, properti hingga jasa.

Sementara itu, sektor perdagangan dan reparasi menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 2.188 orang. Berikutnya sektor jasa dengan 1.606 pekerja. Sedangkan industri makanan menyerap 970 pekerja dan industri kimia sebanyak 623 pekerja. (ful/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Selain Proyek Molor, Material Rumah Pompa Jati Raya Juga Bermasalah

Wabup Mimik Minta Pasir Bercampur Tanah Diganti

SIDOARJO - Proyek pembangunan rumah pompa di Jalan Jati Raya menghadapi dua persoalan sekaligus. Selain progres pekerjaan tertinggal dari target, kualitas material yang digunakan untuk fondasi juga menjadi sorotan. Pasir yang dipakai

banyak bercampur tanah dan tak layak digunakan untuk pembangunan.

Hingga kemarin (21/9), progres proyek baru mencapai 40 persen. Padahal, sesuai target, pekerjaan seharusnya sudah berada di angka 65 persen pekan ini. Keteringgalan 25 persen itu membuat pengerjaan harus dipacu agar tidak melewati batas waktu yang ditentukan.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengatakan,

proyek harus dipercepat karena menjelang musim hujan. Rumah pompa diproyeksikan untuk membantu mengatasi persoalan genangan di kawasan Jati Raya dan sekitarnya. Sehingga, pengerjaan harus dituntaskan sebelum musim hujan.

Persoalan lain muncul dari material yang digunakan untuk pekerjaan fondasi. Saat meninjau lokasi, ditemukan pasir yang dinilai banyak mengandung tanah. Kondisi tersebut menjadi

perhatian karena fondasi merupakan bagian penting yang menentukan kekuatan bangunan.

"Material fondasi harus diganti. Ada campuran tanah dalam pasir," kata Mimik. Menurut dia, bangunan harus kuat. Sebab fungsinya untuk mengatur air saat musim hujan. (ful/hen)

SIDAK:

Wabup Mimik berdiskusi dengan kontraktor terkait perkembangan rumah pompa di Jalan Jati Raya.



Jawa Pos



DIKEBUT: Proyek rumah pompa Lippo Plaza Sidoarjo disidak Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Senin (21/9).

Wabup Tak Ingin Proyek Rumah Pompa Lippo Asal Jadi

■ Minta Kualitas Material Bagus

KOTA-Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana tak ingin proyek rumah pompa di kawasan Lippo Plaza Sidoarjo asal jadi. Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Senin (21/9), dia langsung menyoroti kualitas material yang digunakan dalam pembangunan bak penampungan air tersebut.

Perempuan yang akrab disapa Mak Mimik itu bahkan meminta

material yang dinilai tidak sesuai segera diganti. Menurutnya, konstruksi rumah pompa harus benar-benar kuat karena akan menampung debit air dalam jumlah besar, terutama saat musim hujan. "Saya masih ragu masalah campuran semen, terus kok pasir. Kalau penampungan air ini harus benar-benar kuat, kualitasnya harus benar-benar bagus," tegas Mimik.



Rumah pompa tersebut memiliki ukuran sekitar 8 meter x 30 meter dengan kedalaman 3,6 meter. Bak penampungan diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.000 meter kubik air.

Mimik mengatakan, pembangunan rumah pompa di kawasan Lippo Plaza diharapkan

menjadi salah satu solusi mengatasi banjir yang selama beberapa tahun terakhir kerap terjadi di

kawasan tersebut.

Namun, dia juga menyoroti persoalan lain yang tak kalah penting. Air yang nantinya dipompa dari kawasan Lippo Plaza disebut akan dialirkan menuju Afvour Sidokare.

Mimik khawatir, langkah tersebut justru menambah beban kawasan Sidokare yang selama ini juga kerap dilanda banjir.

"Saya sempat ragu juga. Kalau air ini nanti dipompa, dibuang ke arah Afvour Sidokare, sedangkan Sidokare itu kan sudah banjir."



Wabup Tak Ingin...

Jangan sampai malah tambah kelelep daerah situ," ujarnya.

Karena itu, Mimik meminta pemerintah dan pihak terkait segera memikirkan langkah lanjutan, termasuk normalisasi saluran atau sungai yang menjadi jalur pembuangan air tersebut.

Persoalannya, kawasan sekitar sungai di Sidokare kini sudah sangat padat permukiman. Kondisi itu membuat proses normalisasi tidak mudah dilakukan.

"Kalau memang sungai itu nanti men-

jadi pembuangan, itu harus segera dinormalisasi. Sungai di situ sudah padat penduduk. Tidak bisa dinormalisasi karena sudah rumah semua. Caranya bagaimana, segera pikirkan. Waktunya hanya tinggal tiga bulan," katanya.

Mimik menegaskan, persoalan tersebut harus segera dituntaskan sebelum musim hujan tiba. Dia tidak ingin penanganan banjir di satu kawasan justru memunculkan persoalan baru di kawasan lainnya.

"Jangan sampai Sidokare yang sekian tahun itu banjir, banjir, banjir,

terus ditambah seperti ini lagi. Tolong dipikirkan," tegasnya.

Selain kapasitas dan jalur pembuangan, Mimik juga memperhatikan kualitas material konstruksi. Dia menilai pasir yang digunakan untuk bagian pondasi tidak layak apabila kualitasnya tidak memenuhi standar.

Menurutnya, material untuk pondasi harus menggunakan pasir berkualitas agar konstruksi rumah pompa tidak mudah mengalami rembesan maupun kebocoran. Terlebih, kondisi bawah tanah di lokasi tersebut disebut

memiliki banyak sumber air.

"Saya minta diganti karena ini untuk pondasi. Kekuatan di bawah. Jangan sampai menggunakan pasir seperti itu nanti ada rembesan atau bocor. Apalagi di bawah itu sudah banyak sekali sumber air," jelasnya.

Dia meminta pelaksanaan proyek tidak mengabaikan spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan. Mimik menegaskan, kualitas pembangunan harus menjadi perhatian utama agar rumah pompa benar-benar berfungsi maksimal ketika hujan deras.

Sementara itu, proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar tiga bulan atau paling lambat Desember 2026. Mimik mengingatkan agar target penyelesaian tidak melor karena proyek tersebut berkaitan langsung dengan penanganan banjir.

Jika terjadi keterlambatan pekerjaan, dia memastikan sanksi berupa denda akan diberlakukan sesuai ketentuan kontrak. "Kalau ada kemoloran, ya sanksi, denda. Sudah siap dendanya, ya? Saya sendiri nanti yang denda," tandasnya. (dik/aga)

